**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003[[1]](#footnote-1) tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Dengan demikian pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Khususnya di Indonesia masih banyak yang tidak tau betapa pentingnya mengemban pendidikan yang harus dijalani wajib 12 tahun maka apabila tidak ada penanganan pemerintah kemiskinan di Indonesia semakin merajalela .

Bendara Raden Tumenggung Harya Suwardi Soerjaningrat yang lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara mengatakan dalam bukunya bahwa usaha-usaha pendidikan ditujukan pada ;(a) halusnya budi, (b) cerdasnya otak dan (c) sehatnya badan. Ketiga usaha itu akan menjadikan lengkap danlaras bagi manusia. Dengan demikian pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan batin, yaitu cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Ki Hadjar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidik harus memiliki 3 konsep yakni ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Pengertiannya, bahwa sebagai pendidik harus mampu menjadi tauladan bagi peserta didiknya,pendidik juga mampu menjaga keseimbangan, juga dapat mendorong, dan memberikanmotivasi bagi peserta didiknya. Trilogi pendidikan ini diserap sebagai konsep “kepemimpinan Pancasila”. [[2]](#footnote-2)

 Dari sini kita dapat mengetahui betapa pentingnya pendidikan yang harus kita cari dan kita tuntut , bagitupun sama penting bagi orang-orang yang berkebutuan khusus pada dasarnya semua manusia berhak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003[[3]](#footnote-3) tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu[[4]](#footnote-4).

**Tentang Save The Children**

Save the Children adalah organisasi anak independen terkemuka di dunia berkantor pusat di Inggris. Save the Children beroperasi di sekitar 120 negara termasuk Indonesia. Save the Children menyelamatkan nyawa anak-anak; memperjuangkan hak mereka; dan membantu mengembangkan potensi mereka. Save the Children didirikan tahun 1919 sebagai respon kemanusiaan setelah Perang Dunia I, di mana pendiri organisasi, Eglantyne Jebb, diberi mandat untuk mengkonsolidasikan sebuah tim lintas ilmu untuk bekerja atas nama anak-anak yang terkena dampak konflik. Karena hal inilah, Save the Children ahli dalam respon kemanusiaan, memfokuskan perhatian kita pada kebutuhan khusus anak-anak.

Pada tahun 1923, Save the Children membantu mengubah pandangan dunia terhadap anak-anak dengan menuliskan Deklarasi Hak Anak untuk pertama kalinya. Ini kemudian diadopsi oleh PBB dan menjadi hukum internasional pada tahun 1990 – dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hak Anak / United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Visi tentang hak anak telah menjadi bagian dari hukum di hampir setiap negara, termasuk Indonesia dalam melindungi jutaan anak di dunia.

Visi Save the Children adalah menciptakan sebuah dunia di mana setiap anak mendapatkan pemenuhan hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, pengembangan dan partisipasi. Misi Save the Children adalah menginspirasi lahirnya terobosan baru tentang bagaimana dunia seharusnya memperlakukan anak-anak dan untuk mencapai perubahan-perubahan yang langsung dan berkesinambungan dalam kehidupan mereka. Di seluruh program kegiatan, Save the Children menerapkan nilai-nilai inti berikut:

* Akuntabilitas: Save the Children berkomitmen untuk secara efektif menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang nyata, akuntabel terhadap karyawan, organisasi -dan di atas semuanya- untuk anak-anak sendiri.
* Ambisi: Save the Children mendorong diri organisasi dan mitra organisasi untuk menentukan tujuan ambisius dan berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan anak-anak.
* Kolaborasi: Save the Children menghormati dan menghargai satu sama lain -keberagaman organisasi akan memperkuat kinerja organisasi. Save the Children juga bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan kapasitas organisasi untuk membela kepentingan anak-anak dan remaja.
* Kreatifitas: Save the Children terbuka untuk ide-ide baru, menyambut perubahan dan menerima tantangan untuk solusi berkelanjutan dengan dan untuk anak-anak dan remaja.
* Integritas: Save the Children menetapkan standar tertinggi kejujuran dan integritas, untuk tidak pernah kompromi dalam reputasi organisasi serta selalu bertindak untuk kepentingan terbaik dari anak-anak dan remaja.

**Kiprah Organisasi Internasional Save The Children di Indonesia**

Bagi negara makmur pendonor dan negara miskin yang menerima manfaat bantuan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO tersebut, nama Save the Children sudah tidak asing lagi. Di Jakarta mereka berkantor di Jalan Brawijaya VIII/7 Kebayoran Baru Jakarta mereka termasuk agensi pusat yang di sebar di dunia.[[5]](#footnote-5)

Save the Children US merupakan sebuah organisasi nirlaba terkemuka dalam bidang bantuan dan pengembangan kemanusiaan yang berkarya di lebih dari 45 negara di dunia. Misi organisasi ini adalah untuk menciptakan perubahan positif yang berkesinambungan dalam kehidupan anak-anak yang membutuhkan bantuan.Save the Children US merupakan bagian dari Aliansi Save the Children Internasional, terdiri atas 29 organisasi Save the Children nasional yang independen, yang bekerja untuk mempromosikan hak-hak anak di lebih dari 100 negara. Di Indonesia, Save the Children telah ada sejak tahun 1976. Tujuan keberadaannya adalah bekerja bersama mitra, mendukung perempuan dan anak yang memerlukan bantuan untuk mencapai kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

Contoh study kasus dari Save the Children ini menjalankan program di Aceh, Sumatra Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur. Prinsip program organisasi ini mengutamakan kepentingan anak, kesetaraan jender, pemberdayaan, kesinambungan, dan pada dampak yang luas dan terukur. Save the Children bekerja bersama masyarakat, organisasi lokal dan pemerintah dalam mengubah kehidupan anak dan keluarga Indonesia dengan meningkatkan kapasitas lokal untuk mencaripemecahan masalah masyarakat yang kurang beruntung.

Save the Children telah melakukan kemitraan dengan Pemerintah melalui Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesejahteraan Sosial dan Departemen Pemberdayaan Perempuan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Save the Children juga bermitra dengan asosiasi profesi dan berkolaborasi dengan donor dan badan internasional lainnya. Save the Children bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat lokal dan organisasi keagamaan untuk menjalankan program-program di bidang kesehatan, kredit mikro dan peluang usaha, pendidikan dan perlindungan anak.

 Save the Children juga mendukung usaha peningkatan kapasitas bagi organisasi yang berbasis masyarakat, seperti misalnya kelompok perempuan dan relawan Posyandu. Save the Children juga memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan sektor swasta, dan meningkatkan komitmen sektor swasta bagi kesejahteraan sosial.

**Komitmen Save the Children**

Save the Children sejak keberadaannya di Indonesia memiliki inisiatif-inisiatif yang terencana dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan anak-anak sejak 1976. Program-program kami bagi masyarakat, keluarga dan anak-anak di Indonesia berupa program-program yang memiliki pengaruh langsung dan penting dan perlindungan strategis jangka panjang. Memberdayakan mereka agar dapat menjaga hak-hak anak mereka dan menjamin masa depannya. Bekerja pada tingkat lokal dan dengan mitra nasional maupun lokal, Save the Children memiliki hubungan yang kuat baik dengan masyarakat maupun Pemerintah Indonesia – hubungan yang dapat meningkatkan kemampuan kami untuk merespons dengan cepat bantuan kemanusiaan semisalnya di Aceh setelah tsunami, gempa Yogya dan tsunami di pulau Jawa.

**Perlindungan anak ENABLE**

Memberdayakan Masyarakat dalam Memerangi Perdagangan Anak/Enabling Communities to Combat Child Trafficking (ENABLE) diluncurkan pada bulan Oktober 2005. Program ini menangani pencegahan anak-anak dari resiko perdagangan anak berbasis masyarakat, dan pengembalian dan reintegrasi korban anak. Program ini bekerja sama dengan 39 NGO di pulau Jawa. Baru-baru ini cabang dari program ini mulai bekerja di Aceh mengupayakan pencegahan ekploitasi buruh anak.

**Pendidikan**

Decentralized Basic Education 3 (DBE3) – Peningkatan Relevansi Pendidikan Sekolah Menengah dan Non-Formal terhadap Pengembangan Keterampilan Diri, DBE3 bekerja sama dengan sekolah menengah pertama keagamaan dan umum, pusat pembelajaranmasyarakat, NGO, pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pendidikan dasar dan mengembangkan ketrampilan diri bagi anak-anak dan remaja yang putus sekolah berusia di bawah 18 tahun. Ketrampilan ini akan menyiapkan remaja untuk mendapatkan pembelajaran seumur hidup, memasuki dunia kerja, dan berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan program melibatkan partisipasi dari masyarakat dan sektor swasta dan dipusatkan pada pembangunan keterampilan diri remaja melalui kurikulum; kegiatan ekstrakulikuler untuk mengembangkan keterampilan praktis; menekan angka putus sekolah dengan meningkatkan transisi dan penyelesaian sekolah menengah pertama; dan meningkatkan kualitas pendidikan non-formal dengan mengembangkan pendekatan yang dapat meningkatkan manajemen penyedia pendidikan non-formal dan relevansi materi pembelajaran pendidikan normal dengan pasar kerja di daerah itu.

**Sektor Pendidikan Program**

Intervensi utama sektor pendidikan mencakup pendidikan pra-kejuruan dan keterampilan diri bagi remaja, pelatihan guru sekolah dasar, pembentukan kapasitas Komite Manajemen Sekolah (SMC), bantuan pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan kesadaran pendidikan inklusif dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang hancur selama tsunami. Sektor Pendidikan berkonsentrasi pada pengembangan strategi sektor untuk menangani kebutuhan anak-anak dan masyarakat akan pendidikan jangka panjang dalam hal kualitas dan akses dan mengatasi hambatan institusional. Wilayah kerja mereka adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Sumatera Utara (Pulau Nias) dan Sulawesi Selatan

**Sejarah Pendidikan Inklusif di Indonesia**

Pendidikan sebagai hak untuk semua anak telah tercantum dalam berbagai instrumen internasional mulai dari Deklarasi Universal 1948. Instrumen-instrumen selanjutnya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tertentu,termasuk anak penyandang cacat, sangat rentan untuk dikepinggirkan. Hak untuk memperoleh pendidikan di dalam sistem pendidikan umum dan tidak didiskriminasikan telah disorot dalam instrumen-instrumen yang lebih rinci seperti deklarasi Jomtien dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Namun, hak atas pendidikan tidak secara otomatis mengimplikasikan inklusi. Hak atas Pendidikan Inklusif yang paling jelas telah dinyatakan dalam Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi yang menekankan bahwa sekolah membutuhkan perubahan dan penyesuaian. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan yang secara formal kemudian ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan pada bulan Juni 1994 bahwa “prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.”[[6]](#footnote-6)

Pendidikan inklusif lahir dari perubahan trend dalam kebijakan sosial dan perubahan paradigma sistem pendidikan di beberapa negara di dunia. Anak pada awalnya dibedakan antara yang “normal” dan “tidak normal” dalam layanan pendidikan. Dalam paradigma pendidikan inklusif, perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar. Sehingga sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi kebutuhan anak secara individual.Lahirnya pendidikan inklusif sejalan dengan deklarasi PBB mengenai Hak Azasi Manusia (HAM), yaitu hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang dalam pendidikan. Keberadaan pendidikan inklusif juga didukung oleh deklarasi yang disepakati oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, antara lain adalah pernyataan Salamanca tahun 1994 mengenai hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengakuan terhadap perbedaan minat, kemampuan, dan kebutuhan dalam belajar.

Deklarasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Thailand yang menyatakan bahwa setiap anak wajib diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya; dan Deklarasi Bandung yang menyatakan kesiapan Indonesia menuju inklusi. Pada Deklarasi Bandung tahun 2004 dijelaskan bahwasanya Anak Berkebutuhan Khusus(ABK) di Indonesia mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. Di Indonesia pendidikan inklusif dipayungi oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19/2007 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Warga negara yang dimaksud adalah mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, mereka yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, intelektual dan sosial. Selanjutnya secara operasional di lapangan didukung oleh Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan ketiga sistem pendidikan di atas terjadi pergeseran paradigma berkaitan dengan kedudukan anak dalam konteks pendidikan. Pada sistem pendidikan sebelumnya anak dibagi berdasarkan ciri-ciri fisik atau kecacatan yang melekat pada individu anak. Sedangkan dalam paradigma pendidikan inklusif setiap anak dipandang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tanpa menitikberatkan pada karakteristik fisik atau kecacatan yang melekatpada individu anak. Sehingga sistem pendidikan yangharus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak dan bukan anak yang menyesuaikan sistem. Bagaikan orang memakai baju, lalu baju tersebut terlalu kecil sehingga sempit dan tidak cukup di badan. Maka bukan badannya yang dipangkas agar sesuai dengan ukuran baju, tetapi bajunya yang harus dirombak sehingga cukup.[[8]](#footnote-8)

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelengaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus ( penyandang disabilitas dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa ) untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama sama dengan peserta didik pada umumnya . Pendidikan inklusif menyertakan semua anak secara bersama sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa membeda bedakan anak yang berdasarkan dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis, (keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi, mental,/intelektual, sosial, emosional, dan perilaku. Pendidikan inklusif tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang luas kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan menghargai keaneka ragaman anak dan tidak diskriminatif.[[9]](#footnote-9)

Dalam melaksanakan pendidikan inklusi, Satuan Pendidikan Penyelengaraan Pendidikan Inklusif (SPPPI) banyak ditemu hambatan-hambatan. Baik itu dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan hal lainnya. Untuk itulah maka SPPI perlu memperoleh dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, pusat sumber, Organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi kesehatan, dunia usaha, dan industri, serta lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan inklusif. Dukungan dapat berupa ; bantuan pembiayaan, sarana prasarana , sumberdaya manusia, bantuan teknis, pengembangan kapasitas, pendampingan bantuan professional , dan bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menetapkan pusat sumber sebagai penyedia layanan pendukung pendidikan inklusif di daerah sesuai kebutuhan . Pemerintah provinsi dan kabupaten kota memfasilitasi dan mengkoordinasikan berfungsinya pusat sumber bagi penyediaan layanan pendukung sekolah penyelengaraan pendidikan inklusif.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan peraturan Mentri Penddikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif [[11]](#footnote-11) bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau minat dan bakat istimewa, pemerintah , pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus memfasilitasi penyelengaraan pendidikan inklusif . Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyrakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, prasarana, sarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan dan penelitian.

Dalam rangka memfasilitasi penyelngaraan pendidikaan inklusif, pemerintah provinisi dapat menunjukan Sekolah Luar Biasa (SLB) Sebagai Lembaga Pendukung Pendidikan Inklusif atau Pusat Sumber (Resuource Center) yang di kelola secara independent serta memberikan dukungan kekuatan dan dukungan professional bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus , Selain SLB yang di tunjuk sebagai pusat sumber yang mandiri. Pusat sumber juga dapat didirikan oleh masyarakat yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di provinsi/kabupaten/kota.

Agar SLB dapat melaksanakan tugas secara optimal dalam upaya mendukung penyelengaraan pendidikan inklusif di SPPPI maka perlu memiliki pemahaman dan keterampilan dalam memberdayakan SLB sebagai pusat sumber (resource centre). Dalam upaya mewadahi aspirasi Guru Pembimbing Khusus (GPK) sebagaimana telah ditetapkan sebagai tugas tambahan guru pendidikan khusus yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tentang guru.[[12]](#footnote-12)

Mereka dapat melaksankan tugas pokonya maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah memberdayakan lembaga SLB sebagai pusat sumber ( Resource Centre ) pendidikan Inklusif . Sehubung hal tersebut maka adanya pemberdayaan workshop ini sebagai pusat sumber Resource Centre pendidikan inklusif dan layanan distabilitas tingkat nasional tahun 2018 kepala Direktorat Pembinann PKLK ditjen Dikdasmen melalui Kasbudit Program Direktorat Pembinaan PKLK.[[13]](#footnote-13)

Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui tiga macam lemabaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada SLB untuk anak dengan hambatan penglihatan (Tunanetra), SLB untuk anak dengan hambatan pendengaran (Tunarungu), SLB untuk anak dengan hambatan berpikir/kecerdasan (Tunagrahita), SLB untuk anak dengan hambatan (fisik dan motorik (Tunadaksa), SLB untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku (Tunalaras), dan SLB untuk anak dengan hambatan majemuk (Tunaganda). Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Sementara itu pendidikan terpadu adalah sekolah reguler yang juga menampung anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Namun selama ini baru sedikit sekolah yang mau menampung anak berkebutuhan khusus. Sebagian besar yang lain masih menolak dan keberatan menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah regular (umum).

Pada umumnya, lokasi SLB berada di ibu Kota Kabupaten, padahal anak–anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa), tidak hanya di ibu kota kabupaten. Akibatnya sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara kalau akan disekolahkan di SD terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Permasalahan di atas dapat berakibat pada kegagalan program wajib belajar.[[14]](#footnote-14)

Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar  bersama anak normal (non-ABK) usia sebayanya di kelas ank ar/biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya.  Menerima ABK di Sekolah Dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus.

**Mengapa Terjadi Kerjasama Antara Organisasi Save The Children dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ?**

Save The Children adalah organisasi yang bekerja untuk anak-anak di dunia yang memiliki 28 kantor Save The Children dan beroperasi di lebih dari 120 negara. Project Koordinator Save The Children, Eko Kriswanto mengatakan, Save The Children menyediakan bantuan baik emergency maupun pengembangan jangka panjang, juga menjalankan program-program untuk melindungi anak-anak secara tepat dan berkesinambungan. Di Indonesia Save The Chilldren telah bekerja mulai 1976 dan bekerja di 17 provinsi di Indonesia," katanya pada acara Education for Youth Empowerment (EYE), pendidikan untuk memberdayakan anak muda di Aston SaHotel Jalan Cihampelas, Kamis (3/10).

Save The Children juga bergerak dibidang pendidikan, kesehatan ibu dan anak, perlindungan anak, pemberdayaan anak muda, dan kegiatan respon terhadap *emergency* merupakan program yang ada di Indonesia. Ia juga mengatakan, Save The Children mendpatkan dukungan dari Arsenal Footbal Club untuk program Education for Youth Empowermen atau pendidikan untuk pemberdayaan anak muda. Program ini untuk mendukung anak muda yang berada di sekolah menengah kejuruan. "Tujuan program ini untuk menguatkan dukungan kesempatan kerja bagi anak muda yang berasal dari keluarga-keluarga kurang beruntung di Bandung serta di Jawa Barat Khususnya.[[15]](#footnote-15)

Save The Children, organisasi independen global terkemuka bagi anak menggelar berbagai kegiatan di Jawa Barat. Kegiatan tersebut dalam rangka menyelematkan kehidupan anak-anak, berjuang untuk hak anak dan membantu anak memenuhi potensinya. Dalam sebuah concept papernya, Save the Children UK menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan inklusi itu adalah untuk untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Pendidikan ini berawal dari dalam rumah bersama keluarga dan diterapkan juga dalam pendidikan formal, non formal serta semua jenis pendidikan yang berbasis masyarakat. Itulah beberapa definisi dan tujuan dari pendidikan inklusi yang merupakan hal yang baru bagi kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara anak cacat (berkebutuhan khusus) dengan anak normal lainnya. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain lain. Di Indonesia pendidikan inklusi ini masih tergolong baru dan masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahuinya[[16]](#footnote-16).

Dalam kasus ini ada peranan dari Save The Childern disini sebagai contoh Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Save The Children itu sendiri yang di sokong oleh IKEA foundation Menurutnya program yang sudah dilakukan untuk perlindungan perempuan dan anak, melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung akan sangat terdukung.

Menurutnya P2TP2A membutuhkan tenaga terlatih yang profesional dalam penanganan kasus."Saya ingin kerjasama ini menghasilkan profesional pendamping yang handal, dan yang terpenting nantinya harus ada piloting perlindungan terpadu berbasis masyarakat di tingkat Desa", harapnya. Menanggapi hal tersebut, Regional Education Advisor (Asia) International Programme Els Heijnen menjelaskan, kerjasama tersebut adalah proyek fase kedua yang akan berlangsung sampai akhir Tahun 2018. Menurut Dia, pihaknya telah berdiskusi dengan IKEA Foundation untuk melanjutkan kerjasama di Indonesia,

"Indonesia adalah negara fokus IKEA Foundation, dan mungkin kami akan mengembangkan lebih jauh pada pendidikan inklusif, khususnya melihat pendidikan untuk mewujudkan SDG," [[17]](#footnote-17)berkaitan dengan program yang fokus pada anak-anak, pihaknya berharap pembelajaran terhadap lingkungan dan pemanfaatan planet, juga mengenai pendidikan. "Kita akan memastikan bukan hanya anak yang bersekolah di sekolah umum, tapi juga semua anak, baik anak miskin, anak berkebutuhan khusus (disabilitas), anak kaum minoritas. kita perlu lebih inklusif dalam isu tersebut dan juga perlu melihat ke depan apa yang akan kita lakukan pada generasi berikutnya di Indonesia," tandasnya[[18]](#footnote-18).

Harapan dengan adanya penelitian ini Anak-anak dengan nilai rendah dalam pembelajaran telah sejak lama diklasifikasikan sebagai anak berkesulitan belajar walaupun seringnya pengklasifikasian dilakukan tanpa asesmen yang sesuai yang menunjukan faktor penyebab mengalami hambatan dalam pembelajaran, perkembangan partisipasi alami.

 Karena yang dirasakan anak dengan prestasi belajar kurang baik mungkin disebabkan oleh kondisi kelas sempit, kurikulum dan sistem ujian yang tidak fleksibel, materi pembelajaran yang tidak relevan bagi banyak anak, atau pendekatan mengajar yang kurang ramah anak, dan tidak berpusat pada anak. Oleh karena itu, pelabelan anak yang semata berdasarkan asesmen acak dan tidak memadai adalah tantangan utama bagi inklusi dan juga untuk perwujudan pendidikan untuk semua. Daftar hambatan yang ditemukan di atas dapat digunakan dalam mengidentifikasi tantangan lingkungan, sikap, dan individu yang dihadapi anak-anak penyandang cacat di kelas, sekolah, dan masyarakat kita.

**Kondisi Pendidikan Di Provonsi Jawa Barat**

Jawa Barat sejauh ini masih dinilai belum menyeluruh untuk menerapkan pendidikan inklusi di semua sekolah. Padahal Jawa Barat telah mendeklarasikan diri sebagai sebagai Provinsi pendidikan inklusi sejak 2015 lalu. Dengan adanya deklarasi tersebut, sudah seharusnya seluruh sekolah wajib menerima dan memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. ribuan anak cacat perlu perhatian khusus, dan baru beberapa persen yang bisa dilayani dalam satu atap pendidikan bersama guru yang memiliki kualitas mengajar ABK, tentunya.

Masyarakat berkebutuhan khusus (cacat) sempat dipandang sebelah mata. Dari mulai sekolah yang enggan menerima siswa ABK sampai perusahaan swasta maupun instansi pemerintah yang selektif saat menerima pegawai baru. Persyaratan kondisi fisik yang normal, seolah menjadi hal penting ketimbang potensi lainnya yang bisa menggugah etos kerja. Dampaknya lingkungan pun menjadi terpengaruh untuk mengesampingkan mereka.

Ada hambatan sebuah hambatan yaitu lingkungan yang membuat penyandang disabilitas sulit untuk memperoleh akses atau kesempatan yang sama dengan orang non disabilitas. Hambatan lingkungan tersebut dapat berupa infrastruktur, penerimaan masyarakat, peraturan, atau kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kerugian sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Oleh karenanya, disabilitas merupakan sebuah isu pembangunan; untuk mengatasi permasalahan tersebut pembangunan sosial dan ekonomi harus inklusif. Dalam pembangunan yang inklusif, salah satu hal terpenting untuk dirubah adalah cara pandang masyarakat terhadap isu disabilitas. Disabilitas tidak lagi dipandang sebagai suatu keterbatasan fungsi (impairment), misal tidak dapat melihat atau mendengar, tetapi sebagai sebuah interaksi antara keterbatasan fungsi dan hambatan lingkungannya. Tujuan dari pembangunan yang inklusif sendiri bukan untuk memperbaiki keterbatasan fungsi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, tetapi untuk mendukung penyandang disabilitas agar dapat berperan atau berpartisipasi aktif dalam lingkungan masyarakatnya sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan[[19]](#footnote-19).

Tentu butuh perjuangan dalam merubah kondisi tersebut. Tidak semudah mensukseskan program fisik maupun program sekolah umum lainnya. Selain berbenturan dengan kualitas guru, anggaran pun dipastikan akan menjadi aspek penting sebagai pendukungnya. Kalau tidak pemerintah yang memulai, maka tidak mungkin masyarakat terutama sekolah bisa dengan cepat mensejajarkannya. Peneliti Pendidikan Inklusi Kota Bandung dan sekitar wilayahnya menurut Neneng Masriah mengatakan, masih banyak permasalahan yang ditemui di lapangan. Salah satunya terkait SDM dan sarana di sekolah yang masih terbatas. "Banyak masalah kita temui di lapangan akibatnya banyak anak berkebutuhan khusus yang sudah masuk sekolah negeri malah tak mendapatkan haknya. Masalah muncul ketika anak di dalam kelas, karena ketidakpahaman (guru), serta minimnya sarana dan prasarana yang diberikan untuk anak tersebut,[[20]](#footnote-20)"

Perlu adanya sosialisasi yang masif kepada semua pihak yang bersentuhan langsung dengan anak berkebutuhan khusus. Sebab sebagian besar orang masih berpandangan bahwa anak berkebutuhan khusus itu hanya anak autis atau yang memiliki keterbatasan fisik saja. Padahal jauh dari ini cakupannya luas. Jawa Barat harus mengambil langkah serius untuk menguatkan regionalnya sebagai Provinsi pendidikan inklusi. Langkah pertama yang dapat dilakukan yakni dengan mensinergikan semua dinas terkait di pemerintahan terkait pendidkka inklusi. Selain itu juga terkait SDM dan sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan. Dengan kondisi saat ini dinilai masih jauh dari ideal. Kita harus teruskan dan follow itu sampai Jawa Barat bisa memiliki fasilitas layak untuk mereka. Jadi ada fasilitas belajar yang khusus, kurikulumnya juga dikhususnya untuk mereka. Saya lagi punya ide gimana kalau kita punya sebuah fasiltas atau yayasan milik pemkot yang menyediakan pendamping mereka bersekolah di sekolah biasa.

**Kaum Disabilitas di Provinsi Jawa Barat**

Angka pengangguran terbuka warga penyandang disabilitas yang masuk kategori angkatan usia kerja di Indonesia mencapai 214,221 jiwa. Meski jumlah tersebut hanya empat persen dari total yang ada, Kementrian Ketenagakerjaan mendorong pemerintah daerah untuk terus menekan angka pengangguran dengan pendekatan inklusif melalui pelatihan keterampilan. Sebanyak 430 ribu warga di Jawa Barat merupakan penyandang tunanetra. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar atau setara 1,5 persen penduduk di Indonesia. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Jabar.

Ketua Bank Mata Jabar Netty Prasetyani Heryawan mengatakan penyandang tunanetra di Jabar sebagian besar disebabkan oleh katarak atau gangguan penglihatan karena paparan sinar ultraviolet berlebihan yang berlangsung secara terus menerus. "Ada enampuluh persen disebabkan oleh katarak, sementara sisanya disebabkan oleh glaukoma, refraksi dan faktor genetis," ujarnya usai menghadiri acara pemberian 1.000 Al-Quran digital index braille, di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Senin (7/11/2016). Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus kebutaan karena faktor genetis hanya berkisar 2 persen. Jumlah tersebut terbilang sangat kecil sehingga mengindikasikan bahwa kebutaan bisa dicegah dan disembuhkan[[21]](#footnote-21).

Beberapa upaya tengah dilakukan bank mata guna menanggulangi masalah tunanetra itu. Di antaranya dengan melakukan operasi katarak gratis dan berbagai penyuluhan langsung sebagai upaya pencegahan terjadinya kelainan pada mata. "Untuk pencegahan kita assement warga yang sudah mulai mengalami gangguan glaukoma kerusakan retina, dan refraksi. Salah satunya membagikan kaca mata gratis, tetapi kendalanya masalah anggaran," tutur Netty.

Yayasan Baitul Alkhairiyah yang konsen membantu para penyandang tunanetra siap membantu kendala yang tengah dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menanggulangi masalah keterbatasan penglihatan itu. Yayasan ini berencana memberikan bantuan berupa kacamata khusus bagi para penyandang tunanetra "Intinya kami siap membantu para penyandang tunanetra. Setelah pembagian Alquran digital inedx braille ke depannya, kami pun berencana memberikan bantuan seperti kacamata untuk tunanetra bekerja sama dengan beberapa donor dari luar negeri," ujar Ketua Yayasan Baitul Alkhairiyah Nadia Bawazir.

Menteri Tenaga Kerja, Muhamad Hanif Dakhiri mengatakan bahwa "Dari data nasional tahun 2017, penduduk yang menyandang disabilitas sekitar 21 juta jiwa. Dari jumlah itu, yang termasuk angkatan kerja sekitar 11 juta atau 51,18 persen, sedangkan penyandang disabilitas yang bekerja berjumlah sekitar 10 juta atau 96,31 persen" usai acara gebyar pemberian manfaat kepada penyandang disabilitas di Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (8/8). Bisa dilihat bahwa mayoritas warga penyandang disabilitas bekerja. Pekerjaannya di berbagai bidang. Kategori bekerja itu bukan hanya menjadi pekerja di sebuah perusahaan, tetapi ada yang berwirausaha atau di bidang jasa[[22]](#footnote-22).

Dunia wirausaha disebut sebagai sektor yang paling diminati warga penyandang disabilitas. Pasalnya, peningkatan indeks wirausaha dari 1,67 persen menjadi dua persen saat ini, tidak terlepas dari andil penyandang disabilitas yang berwirausaha.Ia mengakui, angka itu belum maksimal jika didasarkan pada indeks bank dunia yang standarnya minimal 4 persen. Apalagi, capaian itu masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia yang bisa mencapai 5 persen, Tiongkok 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen dan Amerika 12 persen.[[23]](#footnote-23)

Strategi pengajaran yang diterapkan pada anak berkebutuhan khusus di masa lalu biasanya ditentukan oleh diagnosis medis anak-anak tersebut. Mengira bahwa semua anak dengan diagnosis serupa seharusnya diajarkan dengan cara yang sama. Namun, saat ini kita telah mengetahui bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor lain, selain kelainan yang dimiliki oleh anak anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian Skripsi yaitu ; **“Kerjsama Organisasi Save The Children dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Meningkatkan Pendidikan Inklusif Kaum Disabilitas”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong Pendidikan inklusif dan Kaum Disabilitas ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Kerjasama yang di lakukan Oleh Organisasi Save The Children dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimanakah Implementasi Save The Children dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Jawa Barat ?
4. **Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang ada ke dalam aspek aktor yang terlibat, jenis kerjasama ,interkasi hubungan bilateralnya antara NGO dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan waktu dari masalah yang diteliti. Dalam segi aspeknya, peneliti hanya memfokuskan pada pelaksanaan program-program Kerjasama Save The Children dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Implemetasi dari ke dua pihak tersebut dalam bidang pendidikan inklusif di Jawa Barat dari tahun 2011 sampai dengan 2018 .

1. **Rumusan Masalah**

Setelah melalui pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka untuk memperjelas masalah yang diteliti, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Kerjasama Organisasi Save The Children dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Untuk Meningkatkan Kualitas Kaum Disabiltas ?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:
3. Untuk menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pendidikan Inklusif dan kaum Disabilitas.
4. Untuk memberikan penjelasan bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Organisasi Save The Children dan Pemerintah dalam pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Barat
5. Untuk mengetahui implementasi apa yang di lakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Organisasi Save The Childern dalam Pelaksanaan dalam bidang pendidikan inklusif.
6. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai keadaan pendidikan inklusif di Indonesia khusunya Jawa Barat serta bagaimana kondisinya saat ini dan menjelaskan Kerjasama apa sajakah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Organisasi Save The Childern dalam bidang pendidikan inklusif.
2. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam mata kuliah praktikum semester tujuh, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Unnversitas Pasundan.
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [↑](#footnote-ref-1)
2. Ki Hadjar Dewantara. 1961. Karya Ki Hadjar.Yogyakarta: Taman Siswa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-3)
4. Johnsen / Skjørten, hal. 31. [↑](#footnote-ref-4)
5. [www.savethechildren.org](http://www.savethechildren.org). [↑](#footnote-ref-5)
6. Sejarah pendidikan Inklusif “ Pendidikan Inklusif di Indonesia” dalam <http://portalgaruda.org/article.php?article=252714&val=6813&title=Pendidikan%20Inklusif%20di%20Indonesia> hal 71-72 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid [↑](#footnote-ref-8)
9. Drs,H Dedi Kustawan M.Pd dalam “Pemberdayaan SLB Sebagai Sumber Pendidikan Inklusif Dan Layanan Disabilitas Tingkat Nasional Tahun 2018 hal 3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik memilki kelainan dan Memliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimiwa. [↑](#footnote-ref-11)
12. Drs,H Dedi Kustawan M.Pd dalam workshop Pemberdayaan SLB sebagai pusat (Resource Centre) Pendidikan inklusif tahun 2018 hal 4 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
14. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. [↑](#footnote-ref-14)
15. http://jabar.tribunnews.com/2013/10/03/save-the-children-beroperasi-di-120-negara. [↑](#footnote-ref-15)
16. Edeswari. 2009. Pendidikan Inklusi, (Online), (<http://elvinadeswari.wordpress.com/2009/02/20/pendidikan-inklusi/>, diakses 21 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-16)
17. http://www.galamedianews.com/bandung-raya/157038/ikea-foundation-dan-save-the-children-sokong-p2tp2a-kabupaten-bandung.html [↑](#footnote-ref-17)
18. http://www.bandungkab.go.id/arsip/ikea-foundation-dan-save-the-children-akan-sokong-p2tp2a [↑](#footnote-ref-18)
19. http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img\_media/Penyandang%20Disabilitas%20di%20Indonesia\_Fakta%20Empiris%20untuk%20Kebijakan%20Perlindungan%20Sosial%20(Bahasa%20Indonesia).pdf [↑](#footnote-ref-19)
20. [www.merdeka.com/pendidikan/peneliti-sebut-kota-bandung-belum-sepenuhnya-terapkan-pendidikan-inklusi.html](http://www.merdeka.com/pendidikan/peneliti-sebut-kota-bandung-belum-sepenuhnya-terapkan-pendidikan-inklusi.html) (diakses 29-05-2018). [↑](#footnote-ref-20)
21. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3339608/penyandang-tunanetra-di-jabar [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. http://jabarprov.go.id/index.php/news/24401/2017/08/09/Kaum-Disabilitas-Sumbang-Peningkatan-Persentase-Pengusaha [↑](#footnote-ref-23)